

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Al-Mawardi, Imam, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Astawa, Ari, *Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Baasir, Faisal, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 2003.
- H. R., Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2007, Cetakan Pertama,
- Kartika, Titiek, *Penyelegaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- M. D., Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2003.
- Mahayanthy, Yosi Dewi, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2017.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Ranadireska, Hendramin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Thahhan, Musthafa Muhammad, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: Pustaka Zamzami, 2003.
- Thayib, Anshori, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983, Cetakan pertama.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Zuhro, R. Siti, dkk, *Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.

Jurnal:

Hasan, Mustofa, “Aplikasi Teori Politik Islam Prespektif Kaidah-Kaidah Fikih”, *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/> diakses pada 11 Maret 2019.

Nugroho, Heru, “Demokrasi dan Demokratisi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Sosial Politik di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2012, dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/> diakses pada 30 Januari 2020.

Pasaribu, Tota, dkk, “Penerapan Pemilu Berintegritas dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus pada Pilkada Samosir Tahun 2015”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/> diakses pada 6 Maret 2019.

Rahmanto, Tony Yuri, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1, Juli 2019, dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id/> diakses pada 31 Januari 2020.

Simamora, Janpatar, “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2013, dalam <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/> diakses pada 10 Maret 2019.

Sitomorang, Victorio H., “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum”, *Jurnal Balitbangkumham*, Vol. 13, No. 1, Mei 2019, hlm. 86, dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id/> diakses pada 11 Mei 2019.

Skripsi:

Kurniawan, Fathul Rahman, “Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Kepada Daerah Bulukumba Tahun 2015”, *Skripsi*, (Makassar: UNHAS, 2017), dalam <http://repository.unhas.ac.id/> diakses pada 7 April 2019.

Ryandani, Rendy, “Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung pada Pemilihan Kepada Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”, *Skripsi*, (Universitas Lampung: 2018), dalam <https://digilib.unila.ac.id/> diakses pada 11 Mei 2019.

Wibowo, Elfutra Ean, “Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah Serentak 2017 bagi Warga Binaan Pemasyarakatan asal Kabupaten Kulon Progo di Lapas Kelas

II A Wirogunan Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Universitas Gajah Mada Yogyakarta: 2017), dalam <http://repository.ugm.ac.id/> diakses pada 12 Maret 2019.

Berita:

Rofiq, Aunur, “Dispenduk Capil Blitar Datangi Lapas, Napi Bisa Ikut Pemilu”, <https://m.jatimtimes.com/baca/186264/20190117/162100/dispentukapil-blitar-datangi-lapas-napi-bisa-ikut-pemilu/> diakses pada 15 Mei 2019.

Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan Pasal 51 ayat (1).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (5).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perumahan Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perumahan Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perumahan Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 19 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 348 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 349 ayat (1).

Sumber Hukum Islam:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* dan Terjemah, Jakarta: Syaamil, 2009.

Hadist diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*:Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Araby, juz 1.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat, 22-26 Januari 2019.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Roy Mahardika, *Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Blitar*, pada 8 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tetuka, *Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar/ Ketua KPPS/PPS TPS. 019 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar*, pada 8 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Fadhila Kusuma Ningrum, S.IIP. , *Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Blitar*, pada 8 Desember 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Tefanni Sonatha, *Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Blitar*, pada 18 Desember 2019.

Hasil wawancara dengan inisial R.S., *Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar*, pada 14 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan inisial S. R., *Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar*, pada 14 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan inisial W. A., *Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar*, pada 14 Januari 2020.

Dokumen:

Dokumen Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

Dokumen Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

Dokumen Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

KPU Kota Blitar, dalam <http://kpu.blitarkota.go.id/pages/visi-dan-misi> diakses pada 15 Januari 2020.

KPU Kota Blitar, dalam <http://kpu.blitarkota.go.id/pages/tugas-wewenang> diakses pada 15 Januari 2020.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilu 2019 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.